

Peran Pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam Meningkatkan Kompetensi Kewarganegaraan Digital Pada Peserta Didik SMP Negeri 1 Piyungan

Roul Alvaro Prasetyo ^{a,1}, Budi Mulyono ^{b,2}

¹ (roulalvaro.2021@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

² (budi.mulyono@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan. Jenis penelitian ini adalah *ex post facto* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan Tahun Pelajaran 2024/2025 yang berjumlah 759 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *stratified random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 89 peserta didik. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis, analisis deskriptif, serta uji analisis akhir dengan menggunakan uji regresi sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil Uji T, dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,845 > 1,662$). Variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila terbukti mempengaruhi variabel kompetensi kewarganegaraan digital sebesar 52,7%, sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Model regresi sederhana yang dihasilkan yaitu $Y = 7,172 + 1,149X$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman pembelajaran Pendidikan Pancasila maka semakin tinggi pula tingkat kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of Pancasila Education learning on digital citizenship competence in students of SMP Negeri 1 Piyungan. This type of research is ex post facto with a quantitative approach. The population in this study included all students of SMP Negeri 1 Piyungan in the 2024/2025 academic year, totaling 759 students. The sample in this study was taken with stratified random sampling technique using the Slovin formula so that a sample size of 89 students was obtained. Data collection in this study was carried out through a questionnaire. Data analysis techniques in this study include prerequisite analysis test, descriptive analysis, and final analysis test using simple regression test and hypothesis testing. The results of this study indicate a positive and significant influence between Pancasila Education learning on digital citizenship competence in students of SMP Negeri 1 Piyungan. This is evidenced by the results of the T test, where the value $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9.845 > 1.662$). The Pancasila Education learning variable is proven to affect the digital citizenship competency variable by 52.7%, while the remaining 47.3% is influenced by other factors. The resulting simple regression model is $Y = 7.172 + 1.149X$. Thus, it can be concluded that the higher the understanding of Pancasila Education learning, the higher the level of digital citizenship competence in students of SMP Negeri 1 Piyungan.

Sejarah Artikel

Diterima: 17 Maret 2025

Disetujui: 18 Maret 2025

Kata kunci:

Pendidikan Pancasila, Kompetensi Kewarganegaraan Digital, Peserta Didik

Keywords:

Pancasila Education, Digital Citizenship Competence, Students

Pendahuluan

Di era digital yang semakin maju, internet dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, di balik berbagai manfaatnya, dunia digital juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* atau perundungan daring adalah tindakan mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan seseorang melalui platform digital seperti media sosial, pesan instan, atau forum daring. Fenomena ini dapat berdampak serius pada korban, baik secara psikologis, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang

lebih dalam mengenai *cyberbullying*, termasuk bentuk, penyebab, dampak, serta cara mengatasinya, sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat.

Berdasarkan data dari UNICEF pada tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 2.777 anak di Indonesia yang mengalami cyber bullying, 45,35 persen di antaranya pernah menjadi korban *cyber bullying*, dan 38,41 persen di antaranya pernah menjadi pelaku *cyber bullying*. Data tersebut menunjukkan bahwa *cyber bullying* masih menjadi permasalahan serius di kalangan anak-anak di Indonesia. Tingginya persentase korban dan pelaku *cyber bullying* mengindikasikan perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk orang tua, sekolah, dan pemerintah, untuk meningkatkan literasi digital serta menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak-anak. Upaya pencegahan dan edukasi mengenai etika berinternet, dampak psikologis *cyber bullying*, serta mekanisme pelaporan juga harus terus diperkuat guna menekan angka kejadian tersebut. Data di atas juga menunjukkan memang masih terdapat masalah yang terjadi pada masyarakat terutama tentang bagaimana memaknai nilai-nilai Pancasila untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari serta tingkat kompetensi kewarganegaraan digital yang masih harus terus ditingkatkan oleh seluruh warga negara.

Tingkat literasi digital di Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2023, indeks literasi digital Indonesia mencapai 3,65 dari skala 1 hingga 5, menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 3,46 pada 2020, 3,49 pada 2021, dan 3,54 pada 2022. Meskipun terjadi peningkatan setiap tahun, tingkat literasi digital Indonesia hanya berada di angka 62%, yang masih lebih rendah dibandingkan rata-rata ASEAN sebesar 70%, angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan literasi digital terendah di kawasan ASEAN. Data ini bersumber dari survei literasi digital di situs survei.literasidigital.id dan laporan dari CNBC Indonesia.

Dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang amat cepat, maka dapat memiliki potensi penyalahgunaan misalnya penyebaran informasi-informasi hoax, pembuatan konten yang buruk dan merusak moral, dan perilaku menyimpang lain, maka dibutuhkan program untuk pengelolaan, pengembangan dan pengendalian sikap warga negara Indonesia dalam menerapkan media digital dan internet. Program itu berwujud kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), dimana menerapkan model kebijakan kewarganegaraan digital dengan pendekatan melek literasi digital. Program tersebut mesti dirancang secara terstruktur dengan menerapkan peran krusial institusi pendidikan yang memiliki peran yang penting dalam menyiapkan warga negara digital agar siap dalam menghadapi arus globalisasi dan dapat membawa nama baik bangsa. Pembentukan kewarganegaraan digital dapat dilakukan melalui PPKn (Beneziria, 2018)

Dalam upaya pengembangan kompetensi warga negara Indonesia pada masa disrupsi yang sangat berkaitan dengan digitalisasi masa kini, peranan lembaga pendidikan amat krusial untuk menjadi pembentuk warga negara Indonesia yang *smart and good citizenship* melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, dengan pertimbangan bahwasanya Pendidikan Pancasila diajarkan pada seluruh tingkat pendidikan baik di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal pembentukan dan pemberian wawasan pada peserta didik di lingkungan digital kini bisa diupayakan agar dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik pada abad ke-21 serta adanya perubahan pola pemikiran peserta didik sehingga dibutuhkan proses belajar yang efektif dan efisien dengan memadukan literasi digital ke dalam proses belajar PPKn. Dalam konteks ini, pendidikan kewarganegaraan digital harus dirancang secara menyeluruh agar siswa tidak hanya menguasai kemampuan teknis tetapi juga memahami dampak sosial dan etika dari tindakan mereka di lingkungan digital (Kuntari, 2022)

Branson (1999) mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah usaha untuk mengajarkan orang-orang tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis. Definisi ini menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya membahas teori, tetapi juga mengajarkan orang-orang keterampilan kewarganegaraan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat (Vandita & Taufik, 2023). Arrahman (2012) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sistematis untuk membangun warga negara yang baik yang tidak hanya memahami hukum dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengajarkan nilai-nilai keindonesiaan sebagai komponen identitas bangsa (Usmi, 2023). Menurut Nurgiansah (2022), tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menghasilkan warga negara yang memiliki kesadaran bernegara, nasionalisme, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

Krusialnya proses pembelajaran PPKn tercantum pada UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pada Pasal 37 Ayat (1) huruf b dimana bahwasanya kurikulum pembelajaran SD hingga SMA harus mencantumkan pembelajaran PPKn. Begitu juga pada ayat (2) huruf b disebutkan bahwasanya kurikulum perguruan tinggi harus mencantumkan pembelajaran PPKn. Dalam rangka pemaparan substansi PPKn, seluruh pihak mesti melakukan kerjasama dan kontribusi untuk mencapai visi edukasi nasional bangsa. Salah satu substansi pembelajaran yang mesti disampaikan dalam pembelajaran PPKn ialah tentang nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ditujukan agar peserta didik memiliki semangat dan jiwa patriotisme dalam membangun bangsanya.

Dalam perkembangannya, Pendidikan Pancasila telah mengalami berbagai perubahan sejak awal kemerdekaan Indonesia. Mata pelajaran ini pertama kali dikenal sebagai Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada era Orde Baru, dengan tujuan untuk membentuk karakter warga negara sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nomenklatur berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) setelah reformasi, yang lebih menekankan hak asasi manusia dan demokrasi dalam konteks kebangsaan. Saat ini, Pendidikan Pancasila telah menjadi mata pelajaran terpisah dalam Kurikulum Merdeka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila dan cara menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam kurikulum merdeka, pendidikan Pancasila memiliki tujuan strategis untuk membangun karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga ditujukan untuk mendorong orang untuk menerapkan nilai-nilai nasional dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila, sebagai subjek yang menggantikan istilah "Pendidikan Kewarganegaraan", bertujuan untuk menginternalisasi nilai-nilai ideologi negara ke dalam pikiran dan tindakan setiap individu, sehingga generasi berikutnya dapat memahami Pancasila secara konseptual dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari (Ibda, 2012). Nilai-nilai ini termasuk nilai keadilan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan (Hastangka & Farid, 2021).. Dalam hierarki piramidal Pancasila, nilai-nilai saling bergantung satu sama lain; misalnya, sila pertama menjiwai sila kedua, dan sila ketiga juga menjiwai sila pertama, dan seterusnya. Hal ini juga berlaku untuk semua sila lainnya. Selain itu, Pancasila menganut nilai kausa material, yaitu hubungan sebab akibat, dalam penerapan prinsip-prinsipnya. Nilai ketuhanan mengatur hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Jika hubungan seseorang dengan Tuhan baik, maka hubungan mereka dengan orang lain juga akan baik, terutama dalam hal nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, nilai kemanusiaan dan nilai ketuhanan terkait satu sama lain.

Pancasila sebagai pondasi bangsa mempunyai peranan krusial dalam pembentukan identitas nasional, penjaminan kesetaraan, kesatuan dan pengembang prinsip demokrasi. Pendidikan Pancasila penting untuk dipelajari karena pada masa kini nilai-nilai Pancasila semakin luntur dalam kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menjadi masalah yang serius dalam konteks pengembangan sosial-politik dan kebudayaan di dalam negeri. Maka dari itu, pendidikan yang kuat tentang Pancasila dan implementasinya harus dikuatkan pada semua jenjang pendidikan. Di sisi lain, penting pula untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan putusan dan pengembangan kesadaran kolektif tentang krusialnya nilai-nilai Pancasila dalam hidup keseharian.

Pembelajaran Pendidikan Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya lewat media digital. Hal ini dikarenakan media digital dapat menjangkau secara masif dan luas sehingga proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah. Media digital kini dimanfaatkan pada bidang pendidikan karena akan menunjang proses belajar dan perkembangan wawasan. Siswa juga memperoleh wawasan secara cepat dan masif yang diselaraskan dengan kebutuhan. Adapun jika pembelajaran Pancasila masih menerapkan media konvensional, hal tersebut akan menyebabkan perubahan perilaku yang sangat lamban dan tidak menyeluruh.

Dalam rangka pembentukan persiapan warga negara Indonesia dalam menghadapi dengan tantangan globalisasi dan revolusi Industri 4.0 pada abad ke-21, warga negara Indonesia seharusnya sudah melakukan persiapan agar dapat menghadapi transformasi yang begitu pesat. Tantangan transformasi pada saat ini disertai dengan perubahan sikap individu yang didasarkan pada tuntutan zaman. Kecakapan abad ke-21 dan karakter yang dimiliki oleh warga negara Indonesia pada abad ke-21, terbagi ke dalam keterampilan mengidentifikasi masyarakat global, keterampilan bekerja sama dengan individu lainnya dan menerima tanggung jawab atas peranan ataupun kewajiban dalam masyarakat. Di sisi lain, dimensi kewarganegaraan global yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya secara konsisten antara lain ialah tanggung jawab sosial, keterampilan global, dan keterlibatan warga negara global dalam sistem multi-dimensional. Kewarganegaraan digital memberikan bukti bahwasanya sikap daring yang bertanggungjawab dan aman seharusnya dijadikan tema yang krusial pada pendidikan. Penerapan teknologi dan internet yang aman, bertanggungjawab, dan etik, kesadaran digital, dan tanggungjawab, serta hak digital ialah kategori kemampuan kewarganegaraan digital (Choi, 2016). Insani et al., (2024), menyatakan bahwa kewarganegaraan digital adalah alat untuk meningkatkan kesadaran hukum, keamanan siber, dan perlindungan hak dan privasi warga negara di internet.

Kewarganegaraan digital membantu individu berinteraksi secara online dan membangun karakter teknologi bangsa. Pendidikan dapat menerapkan kewarganegaraan digital dengan lebih baik jika didukung oleh kebijakan yang jelas, strategi pembelajaran yang inventif, dan partisipasi aktif guru dalam mengajarkan siswa mereka menjadi warga negara digital yang baik. Seiring dengan perkembangan ini, metode pendidikan berbasis teknologi yang berbasis nilai-nilai Pancasila dapat membantu membangun generasi yang mampu menjadi kewarganegaraan digital yang kuat dan memiliki kesadaran moral tentang cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Ashaari et al., 2022). Menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran membantu membangun warga negara digital yang memiliki moralitas dan kemampuan teknis yang kuat (Nasrullah et al., 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Piyungan yang terletak di Jl. Wonosari KM 14, Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah ini adalah tempat yang tepat untuk melakukan penelitian yang melihat berbagai aspek pendidikan yang terkait dengan perkembangan siswa karena memiliki lingkungan yang baik dan tenaga pendidik yang berpengalaman. Lokasi ini dipilih karena banyak peserta didik yang aktif

menggunakan media sosial namun kurang memahami etika dan tanggung jawabnya sebagai warga negara digital sedangkan di sekolah diajarkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila selama 3 jam pelajaran per minggu sehingga relevan untuk mengkaji pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah *ex post facto* dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan Tahun Pelajaran 2024/2025 yang berjumlah 759 peserta didik. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik *stratified random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 89 peserta didik. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui kuesioner dengan perolehan Kelas VII sebanyak 30 peserta didik, Kelas VIII sebanyak 30 peserta didik, dan Kelas IX sebanyak 29 peserta didik. Validasi instrumen penelitian dilakukan oleh para ahli, yakni satu dosen Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum dan dua guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dengan hasil validasi diolah menggunakan rumus Aiken V. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis, analisis deskriptif, serta uji analisis akhir dengan menggunakan uji regresi sederhana dan uji hipotesis..

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada 89 peserta didik dari Kelas VII, VIII, dan IX di SMP Negeri 1 Piyungan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kuesioner berupa pernyataan dengan skala *likert* yang berjumlah 18 butir untuk variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 24 butir untuk variabel kompetensi kewarganegaraan digital. Berikut data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama adalah melakukan uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan SPSS versi 22. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal sehingga dapat diterima untuk analisis statistik parametrik. Berikut hasil uji normalitas.

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.69184915
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.043
	Negative	-.081
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

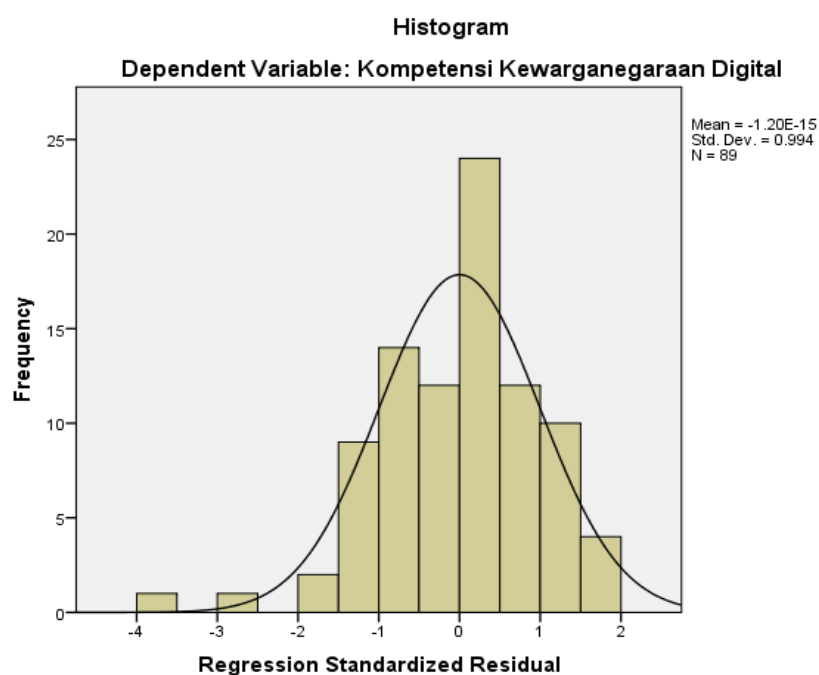
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: output data SPSS 22, 2025.

Berdasarkan tabel 1 di atas, kolom Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,200 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Meskipun diketahui secara statistik bahwa nilai residual berdistribusi

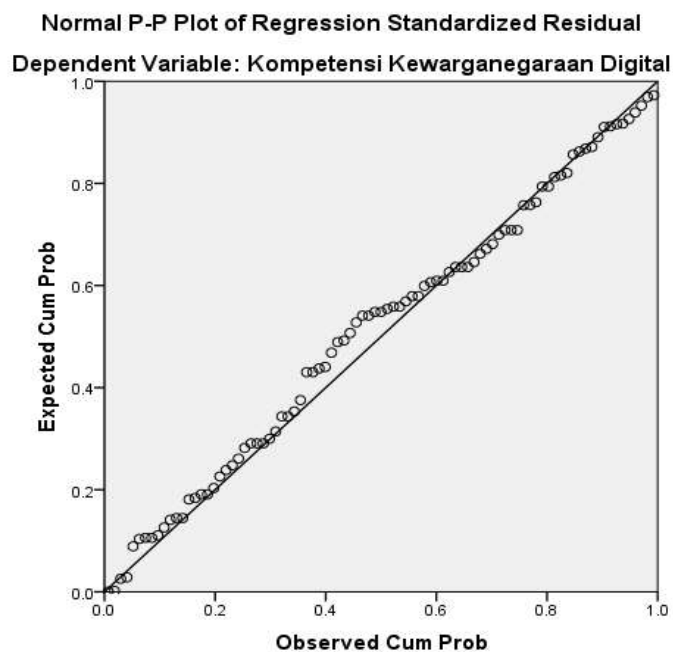
normal, namun tetap diperlukan untuk melakukan analisis grafik histogramnya. Berikut adalah grafik histogram uji normalitas dan normal probability plot dalam penelitian ini.

Gambar 1. Histogram Uji Normalitas



Sumber: output data SPSS 22, 2025

Gambar 2. Normal Probability Plot



Sumber: output data SPSS 22, 2025

Pada gambar 1 di atas, menunjukkan distribusi data yang normal dan memenuhi asumsi dasar dalam analisis statistik parametris. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar di

sekitar dan mendekati garis diagonal, yang menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa metode statistik yang membutuhkan distribusi normal layak untuk digunakan untuk menganalisis lebih lanjut data yang digunakan. Dengan demikian, data dalam penelitian ini berdistribusi normal baik itu diuji secara statistik maupun grafik, sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan uji-uji berikutnya.

Berikutnya adalah melakukan uji linieritas yang hasilnya sudah diolah dengan menggunakan bantuan SPSS versi 22 yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Uji Linieritas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kompetensi Kewarganegaraan Digital * Pembelajaran Pendidikan Pancasila	Between Groups	(Combined)	3850.794	20	192.540	6.016	.000
		Linearity	3176.332	1	3176.332	99.238	.000
		Deviation from Linearity	674.462	19	35.498	1.109	.362
Within Groups			2176.466	68	32.007		
Total			6027.261	88			

Sumber Data : output Data SPSS 22, 2025.

Berdasarkan tabel 2 di atas, diperoleh deviation from linearity sebesar 0,362, yang mana nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 ($0,362 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila (X) dan variabel Kompetensi Kewarganegaraan Digital (Y) memiliki hubungan yang linier.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan hasil yaitu pada variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Pembelajaran Pendidikan Pancasila	89	21	51	72	65.04	.554	5.229	27.339
Kompetensi Kewarganegaraan Digital	89	34	62	96	81.91	.877	8.276	68.492
Valid N (listwise)	89							

Sumber: output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa mean atau rata-ratanya adalah 65,04, standar deviasinya adalah 5,229, skor minimalnya adalah 51, skor maksimalnya adalah 72, kelas intervalnya adalah 21, dan variasinya adalah 27,339. Berikut ini disajikan tabel kategorisasi pembelajaran Pendidikan Pancasila pada responden SMP Negeri 1 Piyungan.

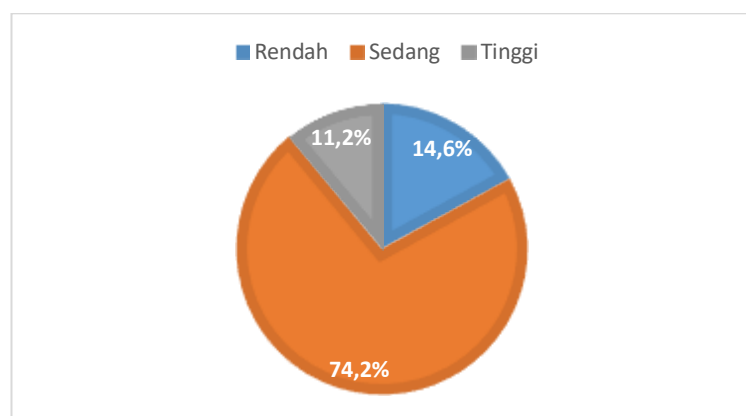
Tabel 4. Kategorisasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila

No	Nilai	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X < 59,81$	Rendah	13	14,6%
2	$59,81 \leq X < 70,26$	Sedang	66	74,2%
3	$70,26 \leq X$	Tinggi	10	11,2%

Sumber:output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan kategori hasil variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila yang terdapat di tabel 4 di atas, data dapat divisualisasikan melalui diagram batang berikut :

Gambar 3. Hasil Kategorisasi Variabel Pembelajaran Pendidikan Pancasila



Berdasarkan tabel 4 dan gambar 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 13 peserta didik (14,6%) melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan kategori rendah, 66 peserta didik (74,2%) melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan kategori sedang, dan 10 peserta didik (11,2%) melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila tergolong sedang, namun ditemukan beberapa peserta didik yang mampu melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 10 peserta didik atau 11,2%.

Kemudian untuk hasil analisis deskriptif pada variabel kompetensi kewarganegaraan digital yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
Pembelajaran Pendidikan Pancasila	89	21	51	72	65.04	.554	5.229	27.339
Kompetensi Kewarganegaraan Digital	89	34	62	96	81.91	.877	8.276	68.492
Valid N (listwise)	89							

Sumber:output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 5 di atas menunjukkan bahwa mean atau rata-ratanya adalah 81,91, standar deviasinya adalah 8,276, skor minimalnya adalah 62, skor maksimalnya adalah 96, kelas intervalnya adalah 34, dan variasinya adalah 68,492. Berikut ini disajikan tabel kategorisasi kompetensi kewarganegaraan digital pada responden SMP Negeri 1 Piyungan.

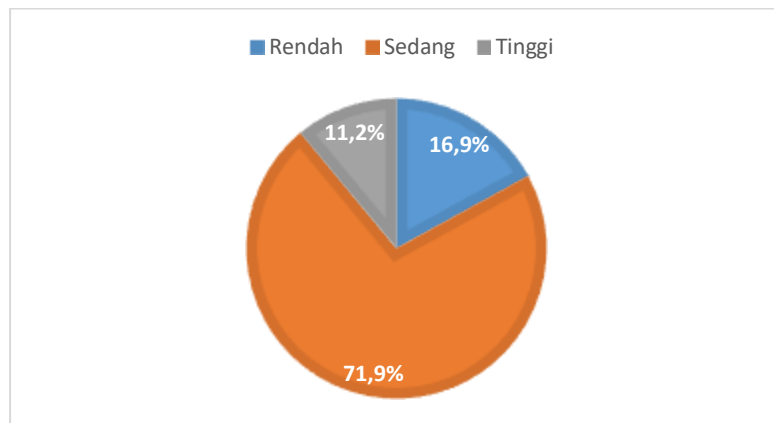
Tabel 6. Kategorisasi Kompetensi Kewarganegaraan Digital

No	Nilai	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	$X < 73,6$	Rendah	15	16,9%
2	$73,6 \leq X < 90,18$	Sedang	64	71,9%
3	$90,18 \leq X$	Tinggi	10	11,2%

Sumber: output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan kategori hasil variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila yang terdapat di tabel 6 di atas, data dapat divisualisasikan melalui diagram batang berikut :

Gambar 4. Hasil Kategorisasi Variabel Kompetensi Kewarganegaraan Digital



Berdasarkan tabel 6 dan gambar 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 15 peserta didik (16,9%) memiliki kompetensi kewarganegaraan digital dengan kategori rendah, 64 peserta didik (74,2%) memiliki kompetensi kewarganegaraan digital dengan kategori sedang, dan 10 peserta didik (11,2%) memiliki kompetensi kewarganegaraan digital dengan kategori tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi kewarganegaraan digital yang dimiliki responden tergolong sedang, namun ditemukan beberapa peserta didik yang memiliki kompetensi kewarganegaraan digital dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 10 peserta didik atau 11,2%.

Berikutnya dilakukan uji hipotesis yaitu yang pertama dilakukan uji regresi linier sederhana yang diolah dengan bantuan SPSS versi 22 adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Uji Regresi Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.172	7.616		.942
	Pembelajaran Pendidikan Pancasila	1.149	.117	.726	9.845

a. Dependent Variable: Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Sumber: output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan hasil uji regresi sederhana sebagaimana ditunjukkan pada tabel di 7 atas, maka dapat dirumuskan model persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta X$$

$$Y = 7,172 + 1,149X$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 7,172 berarti bahwa apabila pembelajaran Pendidikan Pancasila (X) bernilai nol (0), maka nilai kompetensi kewarganegaraan digital diprediksi sebesar 7,172 dan nilai koefisien regresi pada variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila (X) sebesar 1,149, artinya setiap peningkatan 1 unit pada pembelajaran Pendidikan Pancasila (X) maka nilai kompetensi kewarganegaraan digital (Y) akan meningkat sebesar 1,149 sehingga terdapat hubungan yang positif di antara kedua variabel tersebut.

Selanjutnya dilakukan Uji T untuk mengetahui pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan. Berikut adalah hasil uji t yang diolah dengan bantuan SPSS versi 22.

Tabel 8. Uji T

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	7.172	7.616		.942
	Pembelajaran Pendidikan Pancasila	1.149	.117	.726	9.845

a. Dependent Variable: Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Sumber: output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan tabel 8 di atas, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$, sehingga dalam hal ini H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital. Kemudian, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,845, sedangkan t_{tabel} diketahui bernilai sebesar 1,662. Dalam hal ini, nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,845 > 1,662$), artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan.

Selanjutnya dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besaran pengaruh yang diberikan oleh variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila (X) terhadap variabel kompetensi kewarganegaraan digital (Y). Hasil uji koefisien determinasi yang diolah menggunakan bantuan SPSS versi 22 adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.726 ^a	.527	.522	5.724

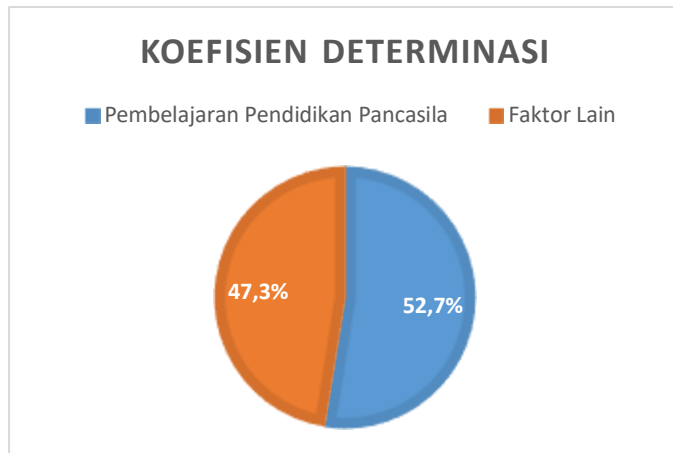
a. Predictors: (Constant), Pembelajaran Pendidikan Pancasila

b. Dependent Variable: Kompetensi Kewarganegaraan Digital

Sumber: output data SPSS 22, 2025

Berdasarkan tabel 9 di atas, besarnya nilai korelasi yaitu sebesar 0,726 sehingga tergolong dalam kategori kuat. Kemudian, dari hasil tersebut diperoleh R Square sebesar 0,527, artinya pembelajaran Pendidikan Pancasila mempengaruhi kompetensi kewarganegaraan digital sebesar 52,7% sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Gambar 5. Diagram Koefisien Determinasi



Berdasarkan hasil data penelitian, dapat diketahui pada variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila diperoleh *mean* sebesar 65,04 sehingga pemahaman pembelajaran Pendidikan Pancasila pada peserta didik termasuk dalam kategori sedang. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman pembelajaran Pendidikan Pancasila yang sudah baik namun perlu meningkatkan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada variabel kompetensi kewarganegaraan digital diperoleh *mean* sebesar 81,91 sehingga kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik termasuk dalam kategori sedang. Perolehan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik memiliki kompetensi kewarganegaraan digital yang sudah baik namun perlu terus meningkatkan tanggung jawabnya dalam menggunakan media sosial.

Berdasarkan olah data yang sudah dilakukan, didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan harapan penelitian yakni terdapat pengaruh pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji hipotesis bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9,845 > 1,662$). Selain itu, diperoleh juga nilai probabilitas sebesar 0,000 kurang dari derajat signifikansi (α) sebesar 0,05 yang telah ditentukan. Sementara itu, perolehan R Square sebesar 0,527 berarti bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila mempengaruhi kompetensi kewarganegaraan digital sebesar 52,7%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila terhadap kompetensi kewarganegaraan digital pada peserta didik SMP Negeri 1 Piyungan.

Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara pembelajaran Pendidikan Pancasila dengan kompetensi kewarganegaraan digital. Hal ini berarti bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila yang baik dapat mempengaruhi tingkat kompetensi kewarganegaraan dari peserta didik, termasuk etika dalam bermedia sosial seperti menghormati privasi orang lain dan juga berpartisipasi aktif di media sosial. Peserta didik di SMP Negeri 1 Piyungan memiliki tingkat kompetensi kewarganegaraan digital sedang, yang menunjukkan bahwa mereka telah memahami dan memenuhi tanggung jawab mereka dalam dunia digital dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tahu cara bijak menggunakan teknologi, tetapi masih ada ruang untuk pengembangan. Hasil ini sejalan dengan pendapat Mulyono et al., (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi kewarganegaraan digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis untuk menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman yang lebih baik tentang etika media, tanggung jawab sosial, dan keamanan dalam ekosistem digital. Winataputra (2001) juga

menambahkan bahwasanya PPKn ialah sarana pembelajaran karakter yang mempunyai tujuan konkret untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan yang meliputi wawasan kewarganegaraan (*civic knowledge*), karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*).

Kemudian, tingkat pengaruh sebesar 52,7% menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila menjadi salah satu elemen penting yang perlu terus diperkuat sehingga peserta didik mampu mengimplementasikan kompetensi kewarganegaraan digital dengan baik. Untuk kedepannya, diperlukan langkah yang progresif agar pembelajaran Pendidikan Pancasila semakin menarik dan juga mampu membentuk peserta didik yang senantiasa mengedepankan etika dalam menggunakan teknologi digital. Untuk membekali siswa keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, kurikulum harus memasukkan kewarganegaraan digital. Menurut Subhan et al., (2023), pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila di era digital. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, siswa tidak hanya memperoleh pemahaman dasar tentang konsep kewarganegaraan digital, tetapi mereka juga belajar bagaimana menggunakan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini menumbuhkan rasa nasionalisme yang fleksibel sehubungan dengan globalisasi dan kemajuan teknologi. Ini memungkinkan generasi muda untuk menjadi pemimpin yang cerdas dan berani dalam menghadapi tantangan digital di masa depan (Alinata et al., 2024)

Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Piyungan berdampak pada kompetensi kewarganegaraan digital siswa. Tingkat pemahaman siswa tentang pelajaran tentang Pancasila berada dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) 65,04, dan kompetensi kewarganegaraan digital mereka juga berada dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata (mean) 81,91. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pembelajaran Pendidikan Pancasila memiliki koefisien regresi positif sebesar 1,149, yang berarti semakin tinggi pemahaman peserta didik terhadap Pendidikan Pancasila, semakin meningkat pula kompetensi kewarganegaraan digital mereka. Selain itu, hasil uji t menunjukkan *thitung* lebih besar dari *ttabel* ($9,845 > 1,662$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sementara itu, uji koefisien determinasi menghasilkan R Square sebesar 0,527, yang mengindikasikan bahwa literasi digital berkontribusi sebesar 52,7% terhadap etika penggunaan media sosial TikTok, sedangkan 47,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik, sekolah, atau Lembaga pendidikan lainnya untuk dapat merancang pembelajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dan kognitif, namun juga mengajarkan tentang kompetensi kewarganegaraan digital.

Referensi

- Alinata, R., Susanti, E., Sari, W. A., Dinillah, S., Nurfadilah, & Sofi, D. N. (2024). Membangun kecakapan kewarganegaraan digital melalui implementasi PKN di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.61476/dOn6cg11>
- Arrahman, M. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa*. Refika Aditama.
- Ashaari, M. F., Ismail, N. F., Rasit, R. M., & Aini, Z. (2022). The Development of Islamic Digital Citizenship Model Based on a Fuzzy Delphi Method. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(4), 97–117. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3804-06>
- Beneziria, 2018. Pengembangan Literasi Digital pada Warga Negara Muda dalam Pembelajaran PPKn melalui Model VCT. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), pp. 11-20.
- Branson, M. S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. LKiS.
- Choi, M. (2016). A Concept Analysis of Digital Citizenship for Democratic Citizenship Education in the Internet Age. *Theory & Research in Social Education*, 44(4), 565–607.

- Hastangka & Farid, M., 2021. Model Pengembangan Pendidikan Pancasila untuk bidang Ilmu Hubungan Internasional. *Jurnal Pendidikan*, 9(2).
- Ibda, H. (2012). *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam*. Ar-Ruzz Media.
- Insani, N. N., Hamidah, S., & Martadinata, W. U. (2024). Optimalisasi Kewarganegaraan Digital melalui Desain Pembelajaran Online. *Journal on Education*, 06(02), 14851–14860.
- Kuntari, A. B. (2022). Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Web: Digizen Learning untuk Meningkatkan Pemahaman Kewarganegaraan Digital di SD XYZ Bogor. *Eligible : Journal of Social Sciences*, 1(1), 11–31. <https://doi.org/10.53276/eligible.v1i1.19>
- Mulyono, B., Affandi, I., Suryadi, K., & Darmawan, C. (2022). Online civic engagement: Fostering citizen engagement through social media. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(1), 75–85. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.49723>
- Nasrullah, R., Aditya, W., Satya, T. I., Nento, M. N., Hanifah, N., Miftahussururi, & Akbari, Q. S. (2017). Materi Pendukung Literasi Digital. *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 43. <http://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/wp-content/uploads/2017/10/literasi-DIGITAL.pdf>
- Nurgiansah, T. H. (2022). Meningkatkan Minat Belajar Siswa dengan Media Pembelajaran Konvensional dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1529–1534. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Subhan, F., Sipahutar, I. Z., Manalu, J., Nababan, R., Sinurat, R., & Manik, S. G. (2023). Sinergisitas Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meminimalisir Tindakan Cyberbullying di Dunia Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik*, 1(2), 96–110. <https://doi.org/10.61476/p4647r60>
- Usmi, R. (2023). Analisis Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 1–9.
- Vandita, L. Y., & Taufik, A. (2023). Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Muda. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2), 290–297. <https://doi.org/10.55681/nusra.v4i2.900>
- Winataputra, U. S. (2001). *Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistematis Pendidikan Demokrasi untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa*. Pusat Penerbitan UT.